

Judul : Pajak e-commerce ditunda, pedagang online kembali bergairah
Tanggal : Senin, 06 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pajak E-commerce Ditunda Pedagang Online Kembali Bergairah

ANGGOTA Komisi XI DPR Anis Byarwati menyambut positif keputusan Pemerintah yang menunda penerapan pajak bagi pelaku usaha e-commerce dan marketplace. Kebijakan ini dianggap sebagai angin segar bagi pelaku usaha online, khususnya UMKM, agar lebih bersemangat mengembangkan usahanya.

Menurutnya, kebijakan ini bisa membuat usaha online kembali bergairah. Dengan beban biaya yang lebih ringan, pelaku usaha punya ruang lebih leluasa untuk berinovasi dan memperluas pasar. Dana yang ada bisa digunakan untuk mengembangkan usaha, sehingga peluang mereka untuk tumbuh semakin besar.

Dia menilai, penundaan pungutan pajak akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperbesar modal usaha, meningkatkan produktivitas. Bahkan, pada akhirnya mampu memberikan kontribusi pajak yang lebih besar bagi negara.

"Kalau usahanya lancar dan tumbuh besar, mereka akan lebih rela membayar pajak, bukan karena terpaksa, tapi karena merasa mampu," ujar Anis dalam keterangannya, Minggu (5/10/2025).

Soal keluhan pedagang offline yang merasa tertekan dengan maraknya belanja online, Anis mendorong adanya inovasi dan diversifikasi usaha. Pedagang konvensional juga perlu memanfaatkan platform digital agar bisa menjangkau konsumen lebih luas, terlebih di era digital seperti saat ini.

"Selain tetap membuka toko offline, pedagang juga perlu

membuka toko online. Dengan begitu, mereka bisa bersaing sekaligus memperluas pasar," ungkapnya.

Kendati demikian, Anis menegaskan, penundaan pungutan pajak ini bersifat jangka pendek. Pemerintah tetap perlu menyiapkan strategi jangka panjang dalam memperkuat penerimaan negara. Termasuk melalui pengaturan pajak di sektor digital yang saat ini banyak didominasi perusahaan asing.

"Perlu koordinasi lintas sektor untuk merumuskan regulasi yang adil, agar industri digital maupun UMKM bisa tumbuh bersama dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," ucapnya.

Ketua Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun menilai, penundaan pajak ini sebagai langkah tepat menghadapi dinamika ekonomi nasional. Soalnya, perekonomian kini tengah dalam fase pemulihan yang perlu dijaga momentumnya. Karena itu, dukungan terhadap pelaku usaha kecil dinilai sangat penting.

"Ini langkah Pemerintah yang realistis. Penundaan ini akan memberi ruang bernapas kepada pelaku usaha agar tidak terbebani di saat ekonomi belum sepenuhnya pulih," kata politikus Golkar itu.

Dia menegaskan, kebijakan pajak digital seharusnya tak hanya berfokus pada perluasan basis penerimaan negara. Lebih dari itu, kebijakan ini juga harus mendorong sistem perpajakan yang modern, memperkuat data fiskal, dan memastikan keadilan bagi pelaku usaha offline maupun online. ■ PVB